

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
AMBON PROVINSI MALUKU**

Gevin Wukt Wakim

NPP. 30.1398

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: gevinwukt04@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr Drs H M Harry Mulya Zein

ABSTRACT

Problems/Background: *Regional Government Coordination in the preparation of the Report on the Implementation of Regional Government of Ambon City, Maluku Province. This background is motivated by the importance of preparing the Report on the Implementation of Regional Government as a form of accountability from the regional government to the central government which is made in a report based on a work plan for one (1) year.* **Purpose:** *This research is so that researchers can find out how the implementation of local government coordination in the preparation of LPPD in Ambon City, Maluku Province.* **Method:** *The research method used in this study is a qualitative research method. The data sources used are primary data sources and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation.* **Results/Findings:** *The results of the research analysis that the researchers conducted, the coordination of the preparation of the Ambon City Regional Governance Report has gone quite well because it has carried out its duties and functions as a coordinator in coordinating all OPDs in filling in the Key Performance Indicator data needed in the LPPD. Based on the indicators used as the basis for the research, there were several indicators that could actually be improved so that the quality of the LPPD would be even better.* **Conclusion:** *In practice the coordination carried out by the Ambon City government has been going quite well and several supporting factors have been found, namely the existence of good coordination built by the Head of the Government Section, the Head of the Autonomy Subdivision and collaboration with various regional apparatus organizations in Ambon city so that in the preparation of the LPPD in Ambon city can run well, the communication and control carried out by the LPPD compilers and the coordination carried out for each LPPD admin are very good so that There are incentives in preparing the Report on the Implementation of Regional Government*

Keywords: *Coordination, Report on the Implementation of Regional Government (LPPD)*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang : Koordinasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku”. dilatarbelakangi oleh pentingnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang dibuat dalam laporan berdasarkan rencana kerja selama satu (1) tahun. **Tujuan:** Penelitian ini adalah agar peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD di Kota Ambon Provinsi Maluku. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hasil analisis penelitian yang peneliti lakukan, koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon sudah berjalan cukup baik dikarenakan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan seluruh OPD dalam mengisi data Indikator Kinerja Kunci yang dibutuhkan dalam LPPD. Berdasarkan indikator yang dijadikan dasar dalam penelitian masih ada ditemukan beberapa indikator yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan agar kualitas LPPD akan semakin jauh lebih baik. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaannya Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon sudah berjalan cukup baik dan ditemukan beberapa faktor pendukung yaitu Adanya Koordinasi yang baik yang dibangun oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Otonomi dan kerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah yang ada di kota ambon sehingga dalam penyusunan LPPD di kota ambon dapat berjalan dengan baik, Komunikasi serta kontrol yang dilakukan oleh penyusun LPPD serta koordinasi yang dilakukan kepada tiap admin LPPD sangatlah baik sehingga Adanya insentif dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kata Kunci : Koordinasi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hubungan yang dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah memiliki peran untuk monitoring, mengevaluasi serta mengontrol apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, pemerintah daerah yang pada dasarnya langsung berhadapan dengan masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan dan mengoptimalkan kewenangan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk otonomi daerah serta dapat mempertanggung jawabkannya

Kebijakan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah didasarkan pada keragaman yang ada di Indonesia. Sehingga, kewenangan desentralisasi yang diberikan dalam bentuk otonomi daerah diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan alinea ke-empat mengamanatkan :

kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

Maka, Indonesia memerlukan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan peran aktif dari masyarakat, agar dapat meningkatkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memerhatikan potensi wilayah serta keanekaragaman yang ada pada daerah tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu bentuk nyata dari konsep desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah yang dilaksanakan dengan tema otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur secara terperinci apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta dapat mewujudkan tema *good governance* yang telah lama

dirancang oleh pemerintah maka diperlukan pelaporan yang biasanya disebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggung jawaban serta menjadi bahan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal ini yaitu kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Proses Penyusunan LPPD memiliki tim penyusun yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Penyusunan LPPD sendiri diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah. Tim Penyusun LPPD memiliki tugas menyusun dan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan LPPD. Penyusunan LPPD ini bagian tata pemerintahan melalui sub bagian administrasi pemerintahan daerah dan otonomi daerah memiliki tugas sebagai penghimpun dan penyaring data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hingga selesai. Namun, tugas ini dapat terkendala jika data yang diminta dari tiap OPD terlambat diberikan sehingga dalam penyusunan LPPD dapat terkendala dan output dari penyusunan tersebut kurang maksimal. Oleh sebab itu dalam penyusunan LPPD memerlukan bantuan serta partisipasi aktif dari tiap-tiap perangkat daerah dikarenakan, data dan informasi yang ada dalam penyusunan LPPD merupakan kompilasi data dari seluruh OPD sehingga apabila ada perangkat daerah yang lambat dalam mengumpulkan datanya maka akan berpengaruh terhadap penyusunan LPPD.

Berdasarkan uraian diatas serta fenomena yang terjadi maka ada beberapa masalah yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Ambon berdasarkan percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan kasubbag otonomi daerah Kota Ambon *via whatsapp* antara lain:

1. Kurangnya kelengkapan data-data dari tiap Organisasi Perangkat Daerah;
2. Keterlambatan pengumpulan data oleh perangkat daerah sehingga dapat menghambat tim penyusun dalam mengkompilasikan data-data dari tiap perangkat daerah secara akurat.;
3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diminta oleh bagian tata pemerintahan tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran;
4. Kurangnya perhatian penuh dari pimpinan akibat dari duplikasi permintaan laporan yaitu berupa Laporan Keterangan PertanggungJawaban Rencana kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Laporan Lainnya.

Berdasarkan uraian dan deskripsi diatas maka peneliti menyusun skripsi riset terapan pemerintahan dengan judul **“Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku”**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dalam pra-penelitian bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan proses penyusunan LPPD masih mengalami kendala berupa kurangnya personil dalam Tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tim penyusun LPPD Kota Ambon belum dapat memiliki jumlah tim yang cukup mengingat dalam pelaksanaan Koordinasi Penyusunan LPPD ini berurusan dengan semua Perangkat Daerah yang ada pada lingkup Dinas Pemerintah Kota Ambon. Hal ini sudah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia yang ada pada tiap perangkat Daerah serta pemeberian Diklat bagi Admin LPPD pada tiap perangkat daerah berpengaruh besar pada pelaksanaan koordinasi nantinya dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Ambon Provinsi Maluku.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Koordinasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat penting. Jurnal penelitian seperti pada penelitian Rizky Panggato (2022) yang berjudul Efektivitas koordinasi dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa Koordinasi dalam penyusunan LPPD sudah berjalan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya dengan baik dimensi input, proses, hasil, dan produktivitas. Upaya yang dilakukan oleh bagian tata pemerintahan sekretariat daerah untuk mewujudkan efektivitas Bagian tata pemerintahan dalam koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah adalah koordinasi dan transparansi dalam rangka terciptanya Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penelitian dari Herry Simon (2020) yang berjudul Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan menyatakan bahwa pelaksanaan Koordinasi penyusunan LPPD kabupaten Pelalawan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang dijadikan dasar oleh peneliti dengan indikator penelitian yang digunakan yaitu komunikasi, Kesadaran pentingnya komunikasi, Kompetensi partisipan, Kesepakatan komitmen dan insentif koordinasi serta kontinuitas perencanaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Nugraha (2022) dengan judul Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa koordinasi antar perangkat pemerintahan dalam mewujudkan tertib administrasi di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sudah terarahnya kegiatan organisasi dan memiliki tujuan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh Brian Rampengan dkk (2020) dengan judul penelitian Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dari 4 (empat) dimensi Koordinasi, Komunikasi yang dilakukan belum secara optimal terwujud, kerjasama yang merupakan kegiatan yang dapat menunjang serta membantu pelaksanaan setiap program belum secara optimal terwujud, Sinkronisasi yang dilakukan masih tumpang tindih sehingga belum secara optimal terwujud serta Integrasi atau kesatuan tindakan belum secara optimal terwujud.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Mutiahsari (2020) dengan judul Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 di pemerintah pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum dapat dipahaminya semua komponen definisi operasional pada Indikator Kinerja Kunci (IKK).

1.4. Pernyataan Kebaruan

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni koordinasi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD kota Ambon yang menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya dan yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya adalah bagaimana jalannya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Ambon dalam penyusunan LPPD sedangkan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rizky Panggato, Herry Simon, Kevin Nugraha, Brian Rampengan serta Irma Mutiahsari lebih banyak meneliti tentang efektivitas dari koordinasi yang dilakukan dalam penyusunan. Selain itu, indikator yang digunakan juga merupakan pendapat dari Erliana Hasan yaitu berupa komunikasi, kesadaran koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan komitmen, penetapan komitmen, penetapan kesepakatan, insentif koordinasi, feedback.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Ambon, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan LPPD Serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam penyusunan LPPD

II. METODE

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat diwujudkan dengan cara terbaik. Penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksikan fenomena, dan menemukan hipotesis Simangunsong (2017). Kemudian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Ambon, Kepala bagian pemerintahan Kota Ambon, Kepala Sub bagian otonomi daerah, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan program pada perangkat daerah, Sekretaris dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Admin LPPD dinas pertanahan, Admin LPPD dinas Pendidikan. Kota Ambon.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan LPPD Kota Ambon

Peneliti menganalisis mengenai fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu koordinasi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD Kota Ambon. Penjelasan mengenai hasil dari proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menjelaskan hasil yang diperoleh selama penelitian. Sebelum penelitian dilaksanakan telah didapati beberapa masalah terkait dengan koordinasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon dapat dikatakan baik dan akuntabel jika Koordinasi dalam penyusunannya berjalan dengan baik. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Erliana Hasan (2014: 53) untuk mengukur sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD Kota Ambon.

3.1.1 Komunikasi .

Dalam pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon terdapat informasi yang diberikan baik itu secara formal maupun informal secara formal penyampaian informasi dapat melalui surat yang diberikan kepada dinas-dinas dan secara informal dapat diberitahukan melalui penyampaian secara langsung. Proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Ambon memiliki alur informasi yaitu dari tiap organisasi perangkat daerah di kota Ambon serta alur informasi secara tidak langsung melalui surat yang diberikan oleh Bagian Pemerintahan Kota Ambon. Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota sudah menggunakan website dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci yang diminta oleh

pemerintah pusat. Website yang digunakan adalah SI-LPPD. Teknologi informasi yang digunakan ini ditujukan agar lebih dapat mempermudah dan mempersingkat koordinasi yang dilakukan.

3.1.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap pentingnya koordinasi pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon sendiri sudah cukup mehetahui dan paham terkait pelaksanaan kegiatan dan pengoordinasiannya. Namun, untuk pelaksana atau admin pada Organisasi Perangkat Daerah masih mengalami kendala karena kualitas SDM yang masih kurang memadai. Penyusun LPPD pada Bagian Pemerintahan telah melaksanakan Sosialisasi ataupun Workshop sebelum pelaksanaan penyusunan LPPD pada Admin LPPD pada tiap organisasi perangkat daerah. Adanya Laporan lain yang harus dibuat seperti LAKIP,LKPJ,SPM oleh tiap-tiap organisasi perangkat daerah juga membuat sedikit terhambatnya pengumpulan IKK oleh tiap OPD

3.1.3 Kompetensi partisipan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya. Selain memiliki kompetensi pegawai dalam hal ini penyusun LPPD maupun admin LPPD pada tiap OPD juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang mumpuni yang dilandasi oleh pengetahuan, Keterampilan dan sikap kerja yang baik dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Ambon adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk melaksanakan penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam tim selanjutnya, pergantian admin LPPD pada beberapa OPD juga menjadi kendala dalam penyusunan LPPD kota ambon karena penyusun LPPD akan lebih ekstra teliti dalam mengecek ulang data Indikator Kinerja Kunci yang diberika oleh tiap OPD. Dalam penyusunan LPPD kota ambon memiliki kendala karena kurang efektifnya website yang ada. Penyusun LPPD harus melakukan pengisian atau *penginputan* data secara dua kali yaitu di ketik secara manual untuk nantinya akan dicetak dan diberikan sebagai bentuk fisik pertanggung jawaban kepada pemerintah provinsi dan harus melakukan *penginputan* data kedalam website SI-LPPD. Hal ini menurut pandangan peneliti dinilai kurang efektif sebaiknya jika dalam website tersebut bisa diperbaharui sehingga dalam penginputan data pada website SI-LPPD dapat langsung dicetak sebagai bukti fisik yang akan bisa langsung diserahkan pada pemerintah provinsi.

3.1.4 Kesepakatan dan Komitmen

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon dalam pelaksanaannya memiliki kesepakatan serta komitmen dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kesepakatan yang dibuat adalah antara

lain dalam penyusunan LPPD sendiri ditetapkan batas pengumpulan Indikator Kinerja Kunci dari tiap OPD kepada Bagian pemerintahan agar dapat di pastikan atau di *crosscheck* secara ulang agar dapat memasukan data secara faktual ke dalam LPPD yang akan dibuat. Serta dalam penyusunan LPPD kota Ambon para pelaksana baik penyusun maupun admin pada tiap organisasi perangkat daerah memiliki komitmen yang tinggi dalam penyusunan LPPD.

3.1.5 Penetapan kesepakatan oleh pihak yang berkoordinasi

Proses penyusunan LPPD Kota Ambon memiliki kesepakatan yang dibuat salah satunya adalah kesepakatan dalam pengumpulan Indikator Kinerja Kunci yang diberikan oleh bagian pemerintahan kepada tiap-tiap OPD melalui admin OPD tersebut. IKK yang diberikan dari pusat kadang kalanya tidak ada pada setiap daerah. Maka, pemerintah pusat perlu untuk mengkaji ulang IKK yang diberikan agar mungkin dapat dibedakan pada setiap daerah selanjutnya, peraturan yang ada bisa dipatenkan agar tidak terjadi lagi perubahan sehingga dapat mempermudah penyusun LPPD dalam menyusun LPPD disuatu daerah.

3.1.6 Insentif Koordinasi

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon tidak memiliki Insentif namun memiliki anggaran yang digunakan untuk berbagai keperluan untuk menunjang penyusunan LPPD Kota Ambon. penyusunan LPPD memiliki insentif guna untuk menunjang proses penyusunan LPPD Kota Ambon. yang mana, insentif tersebut didapat dari anggaran belanja bagian pemerintahan yang digunakan untuk berbagai keperluan yang dapat menunjang proses penyusunan LPPD Kota Ambon.

3.1.7 Feedback

Feedback atau umpan balik merupakan suatu respon yang diberikan. Pada penyusunan LPPD Kota Ambon antara penyusun LPPD dengan admin LPPD pada tiap OPD sendiri memiliki feedback yang baik. Umpan balik yang diberikan oleh admin LPPD sangat baik dalam penyusunan LPPD sehingga koordinasi yang dilakukan oleh penyusun dengan tiap admin OPD berjalan dengan lancar dan baik.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan LPPD Kota Ambon

3.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan sesuatu yang mendukung atas pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku. Faktor pendukung menjadi hal yang penting dan wajib diketahui serta di manfaatkan oleh pihak terkait agar terlaksananya suatu kebijakan yang dimaksud

Adanya Koordinasi yang baik yang dibangun oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Otonomi dan kerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah yang ada di kota ambon sehingga dalam penyusunan LPPD di kota ambon dapat berjalan dengan baik

Komunikasi serta kontrol yang dilakukan oleh penyusun LPPD serta koordinasi yang dilakukan kepada tiap admin LPPD sangatlah baik sehingga

Adanya insentif dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.2.2. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat dalam penyusunan LPPD Kota Ambon berasal dari internal dinas atau pelaksana kebijakan itu sendiri yang mana hal tersebut dapat memberikan hambatan kepada pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut khususnya dalam penyusunan LPPD Kota Ambon Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, masih ditemukan adanya kekurangan dalam penyusunan LPPD Kota Ambon yang berkaitan dengan kurangnya SDM di Kota Ambon

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni sehingga Tim penyusunan LPPD kota Ambon perlu ditambah jumlah anggotanya.

Adanya perubahan kebijakan dari tahun ke tahun yang menyebabkan penyusun LPPD harus menyusun ulang Indikator Kinerja kunci menyesuaikan dengan perubahan yang diberikan.

Proses penyusunan laporan lain selain LPPD yaitu LAKIP, LKPJ, SPM dll .

Indikator Kinerja Kunci yang diberikan oleh Pemerintah pusat tidak ada di kota ambon sehingga mempengaruhi nilai LPPD kota ambon.

3.3. Upaya mengatasi Hambatan Koordinasi Pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD Kota Ambon

Upaya merupakan suatu kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan dari suatu pekerjaan. Upaya adalah usaha untuk mengkomunikasikan maksud, alasan, dan gambaran besarnya. Upaya adalah segala sesuatu yang diusahakan sesuatu agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, sasaran dan fungsi, serta manfaat dari apa yang dilaksanakan. Upaya tersebut erat

kaitannya dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan yang ada, metode, metode dan alat pendukung lain yang digunakan untuk keberhasilan. Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian usaha adalah usaha atau kegiatan yang menggunakan segala daya yang ada untuk mengatasi suatu kendala atau masalah. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan dalam Koordinasi penyusunan LPPD kota Ambon adalah

Peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia di kota ambon melalui diklat yang diberikan oleh pemerintah.

Pelatihan kepada admin LPPD dari setiap OPD sebelum melaksanakan penyusunan LPPD

Pemerintah pusat dapat menyederhanakan proses pemasukan data LPPD hanya melalui website sehingga penyusun tidak harus mengisi data secara ganda baik di website maupun melakukan pengisian manual.

Perlu adanya evaluasi dari pemerintah pusat sehingga Indikator Kinerja Kunci tidak di sama ratakan di setiap daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini Koordinasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku dilakukan dengan mengamati proses koordinasi yang dilakukan oleh tiap perangkat daerah dalam penyusunan LPPD Kota Ambon berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi LPPD serta Permendagri No 18 Tahun 2020 yang merupakan aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai penyusunan LPPD. Penelitian yang dilakukan oleh Elip Helden pada tahun 2020 tentang Implementasi Penyusunan LPPD dalam pelaksanaan pembangunan Kota Metro, Penelitian oleh Brian Rampengan pada tahun 2018 tentang Efektifitas Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Malalayang Kota Manado, Penelitian oleh Irma Mutiahsari pada tahun 2020 tentang Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2020 di pemerintah Kota Pangkalpinang. Ketiga penelitian tersebut membahas tentang implementasi dan efektifitas dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas lebih mendalam tentang Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaannya sehingga bagi penulis ada beberapa hal yang bisa dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah, pelatihan kepada admin penyusunan LPPD dari tiap perangkat daerah yang ada di Kota Ambon.

Sehingga pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan dalam penyusunan LPPD kota Ambon dapat berjalan dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kota ambon dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sudah berjalan baik sesuai indikator yaitu komunikasi, Koordinasi, Kompetensi Partisipan, kesepakatan dan Komitmen, Penetapan Kesepakatan oleh pihak yang berkoordinasi, Insentif Koordinasi, dan feedback. Namun pada dimensi Kompetensi partisipan masih perlu ditingkatkan lagi sehingga dalam Tim penyusun LPPD Kota Ambon dapat memiliki jumlah tim yang cukup sehingga dalam pelaksanaan penyusunan LPPD dapat berjalan dengan baik mengingat dalam pelaksanaan Koordinasi Penyusunan LPPD ini berurusan dengan semua Perangkat Daerah yang ada pada lingkup Dinas Pemerintah Kota Ambon.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Ambon terkhususnya Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan yang telah menerima peneliti dalam menggali berbagai informasi tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Ambon Provinsi Maluku serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Hasan, Erliana dan Eva Eviany. 2014. *Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan*. Jakarta

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta

PENELITIAN SEBELUMNYA:

Mutiahsari, I., Azhar, A., & Thamrin, M. H. 2022. Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2124–2132.

Rampengan Florence, B. R., Lengkong, D., & Dengo, S. (n.d.). *EFEKTIFITAS KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO*.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi LPPD

